

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PEKANBARU**

**GAYA KEPEMIMPINAN PENGHULU KAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG KEMUNING MUDA
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh:

ROHI MUZAKI
167310964

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmad dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak”. Ini penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan Skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu serta pengalaman pribadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari sedari awal pemulaan pengajuan judul usulan penelitian ini sehingga sampai pada Skripsi yang layak di ujiankan
4. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan menyediakan waktu dan membagi serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi penulis layak untuk di ujiankan.
5. Untuk teman teman saya yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu saya selama perkuliahan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan.Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Penulis

Rohi Muzaki

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Pemerintahan	20
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	23
3. Konsep Manajemen Pemerintahan	24
4. Konsep Kepemimpinan.....	26
5. Konsep Gaya Kepemimpinan	30
6. Konsep Pemerintahan Desa	37
7. Konsep Pembangunan.....	38
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pikir	39
D. Konsep Operasional.....	41
E. Operasionalisasi Variabel.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan dan Key Informan	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Jadwal Penelitian	48

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Kabupaten Siak	49
1. Luas wilayah	49
2. Letak dan Kondisi geografis	49
3. Topografi.....	50
4. Geologi.....	50
5. Klimatologi	50
B. Sejarah Kabupaten Siak	50
C. Visi dan Misi Kabupaten Siak	53
D. Sejarah kecamatan Bunga Raya.....	56
E. Visi dari Kelurahan Bambu Kuning	53
1. Keadaan Penduduk	57
2. Sarana Pendidikan	58
F. Kepercayaan Masyarakat Kecamatan Bunga Raya	59
G. Struktur Organisasi Desa Kemuning Muda	59

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan	61
1. Jenis Kelamin	61
2. Pendidikan.....	62
3. Umur	62
B. Hasil dan Pembahasan	63
1. Intruksi	64
2. Konsultasi.....	68
3. Partisipasi	71
4. Delegasi.....	75
C. Faktor Penghambat	78

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
---------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 APNDes Desa Kemuning Muda tahun 2019	13
I.2 Pembangunan Fisik Di Desa Kemuning Muda tahun 2019	15
II.1 Penelitian Terdahulu.....	39
II. 2 Operasional Variabel	43
III.1 Informan dan Key Informan	46
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	48
IV.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan bunga raya berdasarkan desa.....	58
IV.2 Jumlah Sarana Pendidikan.....	58
V.1 Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
V.2 Identitas informan berdasarkan Tingkat Pendidikan	62
V.3 Identitas informan berdasarkan tingakt Umur	63

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
II.1 4 Gaya Kepemimpinan	33
II.2 Prinsip utama membentuk Gaya Kepemimpinan	35
II.3 Kerangka Pikir	40
IV. Struktur Organisasi Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara Penelitian	84
Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	90
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	91
Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Sriindrapura.....	92
Lampiran 5 Surat Keterangan Desa Kemuning Muda	93
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	94

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Rohi Muzaki
Npm : 167310694
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Skripsi : Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian koreprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 22 Februari 2021
Pernyataan

Rohi Muzaki

**GAYA KEPEMIMPINAN PENGHULU KAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG KEMUNING
MUDA KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Rohi Muzaki

Dana bantuan langsung yang dialokasikan kepala pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, Dengan demikian yang telah dianggarkan dalam perencanaan pembangunan desa yang dibuat sudah sesuai, namun hasilnya belum sesuai dengan seperti yang diharapkan. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan baik secara fisik maupun non fisik gencar-gencarnya dilakukan. Kepemimpinan kepala Desa diharapkan mampu membangun jaringan penyuluhan serta pembinaan yang sifatnya berkelanjutan, terorganisir dan tepat sasaran. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan penghulu kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di kampung kemuning muda Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif, Penulisan ini menggambarkan kondisi objek yang di temukan di lapangan berdasarkan data-data di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan Gaya kepimpinan penghulu di Kampung Kemuning mudadengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kepemimpinan oleh Miftah thoha (2015:56). Penulisan terdiri dari data primer yang sama di peroleh melalui alat penelitian berupa wawancara dan observasi dan data sekunder yang di peroleh dari hasil wawancara sesuai dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dalam penyelenggaraan pembangunan di kampung kemuning muda penghulu dinilai kurang demokrasi dalam pembangunan dan juga kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Desa disarankan kepada Penghulu Kampung Kemuning Muda untuk lebih demokratis dalam pembangunan baik memberikan masyarakat dalam berpartisipasi baik ide, tenaga dan evaluasi hasil pembangunan

Kata kunci : Kepemimpinan, Pembangunan , Partisipasi , masyarakat

**LEADERSHIP STYLE OF KAMPUNG ULTRASTERS IN THE
IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN KEMUNING MUDA
KAMPUNG KEMUNING MUDA KECAMATAN BUNGA RAYA
DISTRICT SIAK**

ABSTRACT

Rohi Muzaki

In the context of leadership, this nation needs strong leaders in various sectors of community life, leaders with national insight in dealing with complex national problems. The leadership of the village head is expected to be able to build a network of counseling and coaching that is sustainable, organized and right on target. The purpose of this study is to describe the leadership style of the leader of the kemuning Muda village in Bunga raya District, Siak Regency. The method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis techniques, this writing describes the conditions of the objects found in the field based on data in the field related to the problems of leader leadership style in Kampung Kemuning Muda with interviews and observations as data collection tools. , and the data collected is then presented as the main raw material for analyzing the empirical conditions and the objectivity of the existence and objectives of the research in the location under study there are 4 groups to be the object of research. The writing consists of the same primary data obtained through research tools in the form of interviews and observations and secondary data obtained from the results of interviews in accordance with the results of the study, the conclusion is that the leadership of the leader is considered less democratic in development and also does not provide opportunities for the community to participate in Village activities are suggested to the leader of Kemuning Muda Village to be more democratic in development, both providing the community with good participation in ideas, personnel and evaluation of development results

Keywords: Leadership, Development, Participation, community

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks kepemimpinan, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang kuat di berbagai sektor kehidupan masyarakat, pemimpin yang berwawasan kebangsaan dalam menghadapi permasalahan bangsa yang demikian kompleks. Indonesia sebagai Negara yang menerapkan sistem Pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar mampu menjalankan roda pemerintah dengan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahannya.

Pemimpin adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk dapat bekerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seseorang yang mempunyai kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai seorang yang dipercaya untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin. Pemimpin adalah tokoh anggota masyarakat yang dikenal secara langsung atau tidak langsung oleh pengikutnya (Wirawan 2013: 9).

Kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi maupun kelompok yaitu untuk dapat menggerakkan, memberdayakan, dan mengarahkan sumber daya secara efektif dan efisien kearah pencapaian tujuan. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam kemajuan atau kemunduran suatu daerah, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin.

Keberadaan seorang pemimpin pada Lembaga Pemerintahan seperti Kepala Daerah, Kepala Kecamatan, Kepala Desa dan sebagainya sangatlah penting didalam Era Otonomi seperti sekarang ini. Tugas-tugas seorang pemimpin tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pegawai atau bawahannya karena merekalah yang harusnya bergerak lebih awal atau memelopori, mengarahkan pikiran dan pendapat bawahannya, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi dan harus dapat mempengaruhi sekaligus melakukan pengawasan atas pikiran, perasaan, dan tingkahlaku aparatur pemerintahan yang dia pimpin.

Peran Kepemimpinan dapat diartikan sebagai sperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin (Rivai,2013:148). Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannyasebagai seorang pemimpin, mereka diharuskan memiliki sikap dasar dan sifat-sifat kepemimpinan, teknik dan gaya kepemimpinan sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi daerah atau lokasi yang dipimpinya, serta ditopang oleh kekuasaan yang tepat.

PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, adalah salah satu peraturan menteri dalam negeri yang keluar bebarengan dalam segepok peraturan menteri dalam negeri yang kejar tayang dan dilemparkan oleh menteri dalam negeri TjahjocKumolo pada 31 Desember 2014.

Pedoman pembangunan Desa yang dibuat dalam permendagri 144 tahun 2014 ini berdasarkan pada :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558;

Aktor -aktor pelaku pembangunan desa sebagaimana disebutkan dalam PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa di pasal 2 dan 3 disebutkan sebagaimana berikut:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota.

2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
6. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintahan Daerah meliputi hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

Berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak pada Pasal 6 menjelaskan Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Kampung adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan, pembangunan, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten.
2. Kampung adat pada dasarnya melakukan tugas yang hamper sama dengan kampung, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
3. Untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melanggar adat istiadat, kampung adat mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
 - b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
 - c. Pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;

- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat.

Kepemimpinan kepala Desa diharapkan mampu membangun jaringan penyuluhan serta pembinaan yang sifatnya berkelanjutan, terorganisir dan tepat sasaran. Membangun lahan pertanian, peternakan, usaha kecil dan menengah, yang disesuaikan dengan karakteristik desa. Membangun dan memperbaiki saluran irigasi dengan cara memanfaatkan alam sekitar, tanpa merusak lingkungan, amat terlebih membangun jaringan pemasaran hasil produksi dengan jalan memberdayakan koperasi secara mandiri dan profesional.

Keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa, yakni seberapa jauh kepala desa merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksana dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pemerintahan Desa perlu memiliki pemimpin yang memberikan pembinaan kepada masyarakatnya dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang Desa bahwa pemerintah mengakui dan

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam usaha untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerah maka dibentuklah pemerintahan desa untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, pemerintahan desa dalam hal ini dijalankan oleh seorang kepala desa bersana Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menjalankan pemerintahan di desa, seorang kepala desa memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antar lain:

1. Bertugas menyelenggarakan pemerintahan;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat desa;

Dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

- b. Kewenangan lokal bersekala Desa;

Yang dimaksud dengan “Kewenangan lokal bersekala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

- c. Kewenangan yang ditegaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas, sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- c. Tertib kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- d. Keterbukaan;

Yang dimaksud “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- f. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Akuntabilitas ;

Yang dimaksud “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Efektivitas dan Efisiensi

Yang dimaksud “efektifitas” adalah asas yang menentukan bahwa tiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai rencana dan tujuan.

i. Kearifan lokal;

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

j. Keberagaman;

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k. Partisipatif;

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Didalam melaksanakan roda pemerintahan desa maka sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Dan pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Paradigma pembangunan saat ini mengalami perubahan yang sangat semakin cepat, sehingga dibutuhkan para aparatur pemerintah yang benar-benar

dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah, saat ini tuntutan masyarakat mengenai pelayanan kepada masyarakat merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di Kampung, Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan.

Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) sebagai seorang pemimpin di pemerintahan Kampung dan memiliki fungsi kepemimpinan, yaitu mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan, dengan cara memberikan pengertian dan semangat untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka penghulu Kampung dan BAPEKAM sebagai pemimpin pemerintah Kampung memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, dalam ikut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik.

Sesuai dengan kewenangan penghulu atau Kepala Desa dalam kepemimpinannya untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Keberhasilan penghulu dalam kepemimpinan wilayahnya, akan terpulang kepada kemampuan penghulu kampung itu sendiri didalam memimpin untuk mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi dan kerjasama untuk mencapai tujuan program pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena, semakin kuat kemampuan Penghulu Kampung dalam kepemimpinannya, maka semakin kuat pula turut serta dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat tentu saja terlepas dari dukungan BAPEKAM.

Sehubungan dengan kepemimpinan, ada beberapa pakar mengemukakan mengenai teorinya tentang pemimpin. Seperti, Hasibuan (2002) merumuskan istilah pemimpin adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Hasibuan mempertegas bahwa kepemimpinan adalah gaya dalam melakukan tugas-tugasnya. Gaya kepemimpinan ini dipertegas oleh Thoah (2003:49) bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat.

Pembangunan Desa akan terwujud dengan adanya keikutsertaan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada didesanya. Karena dasarnya pembangunan desa membutuhkan kerjasama dari masyarakat, seperti halnya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Bab IX tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan pasal 78 ayat 3 yaitu pembangunan Desa sebagaimana dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan persatuan perdamaian dan keadilan sosial.

Dari sekian banyaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa/Kampung Kemuning Muda bersumber dari bantuan dana pemerintah dan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah.
2. Dana Desa (DD) dan Dana Swadaya Masyarakat

Dapat penulis gambarkan bahwa kedua sumber dana tersebut diatas terdapat didalam sebuah Rancangan Pendapatan Belanja Desa (RPBDes) dan kemudian menjadi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan persetujuan Badan Permuswaratan Desa (BPD).

Dalam penelitian ini terkait dengan pembangunan desa maka anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa/Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun 2019 dapat dilihat dari data tabel I.I berikut:

Tabel I. 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa/Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tahun2019.

No.	Uaian	Anggaran (Rp.-)	Keterangan
1.	Pendapatan Desa	Rp. 2. 168.000.286	
2.	Belanja Desa		
	a. Badan Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp. 982.437.455	
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 547.804.396	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.034.000	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 355.578.900	
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0	
	Jumlah Belanja	Rp. 2.034.854.751	
	Suplus/Defisit	Rp. 133.145.535	
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 28.158.465	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 161.304.000	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 133.145.535	

Sumber; Kantor Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Bantuan langsung ADD yang tertera dalam Tabel I.1 diatas adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa. Maksud pemberian langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana peransang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan fisik di desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak adalah sebagian besar partisipatif dan biaya dari Alokasi Dana Desa (ADD) di proyek pembangunan fisik/sarana umum. Meskipun beberapa pembangunan fisik/sarana umum sudah dilaksanakan di desa Kampung Kemuning Muda kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, namun hasilnya dan pelaksanaannya belum maksimal dan optimal. Hal ini sesuai dengan pengamatan awal penelitian penulis dan hasil wawancara terhadap warga sekitar, sekretaris desa dan perangkat Desa, bahwa kemampuan kepala desa dalam pelaksanaan tugas terutama dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan masih belum memanfaatkan partisipasi masyarakat secara maksimal.

Tabel I. 2: Pembangunan Fisik yang dilaksanakan di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

No.	Jenis Kegiatan	Biaya	Sumber Dana	Tahun	Tingkat Pencapaian
1.	Pembangunan Semenisasi gg. Sepakat	Rp. 53.796.196	Dana Desa (APBN)	2019	
2.	Pembangunan Kios Pasar Kampung	Rp. 353.344.900	Dana Desa (APBN)	2019	
3.	Pembangunan Drainase gg. Sultan syarif kasim	Rp. 161.358.800	Dana Desa (APBN)	2019	
4.	Pembangunan Drainase gg. Maharaja lela Pahlawan	Rp. 41.093.400	Dana Desa (APBN)	2019	
5.	Pembangunan jembatan gg. Mawar	Rp. 99.203.000	Dana Desa (APBN)	2019	
6.	Pembangunan jembatan usaha tani gg. Durian	Rp.99.203.000	Dana Desa (APBN)	2019	
7.	Pembangunan Gedung Posyandu	Rp. 12.850.000	Dana Desa (APBN)	2019	

Sumber: Kantor Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tahun 2019

Bantuan Langsung Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertera dalam Tabel I.2 diatas adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepala pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat. Berdasarkan dari data anggaran pembangunan fisik/infrastruktur desa

yang terlihat diatas, maka disimpulkan bahwa anggaran dana yang telah dikeluarkan sudah sesuai dan sudah mencapai tingkat yang baik. Walaupun dan anggaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan yang seharusnya, namun pemabangunan yang terjadi dan yang terlihat dilapangan tidak sesuai. Karen ini terlihat masih banyaknya kawasan-kawasan atau tempat tertentu yang masih belum memadai seperti dana anggaran yang dismpaikan diatas, dengan artian anggaran dana yang digunakan tersebut tidak tepat sasaran.

Dengan demikian yang telah dianggarkan dalam perencanaan pembangunan desa yang dibuat sudah sesuai, namun hasilnya belum sesuai dengan seperti yang diharapkan. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan baik secara fisik maupun non fisik gencar-gencarnya dilakukan.pembangunan non fisik seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya memerlukan sarana dan prasarana. Prasarana dan sarana tadi memerlukan lahan dan bahan yang diambil dari permukaan bumi. Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya itu mengembangkan gerak, interaksi, difusi dan arus yang memerlukan ruang. Tanpa ruang pengembangan tadi tidak dapat memenuhi kriteria sebagai pembangunan.

Sedangkan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Untuk membangun prasarana dan sarana, memerlukan bahan yang digali di permukaan bumi ini. Oleh karena itu untuk keseimbangan pembangunan antara fisik dan non fisik dan dengan alam lingkungan perlu adanya

perancangan, perencanaan, dan studi kelayakan. Sehingga diharapkan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dapat berjalan dengan baik.

Alasan penulis melakukan penelitian ini ialah karna untuk menambah wawasan penulis dan rasa keingin tahuan penulis terhadap obyek yang ingin penulis teliti. Adapun fenomena yang penulis temui dilapangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa atau Penghulu Kampung tidak Demokratis dalam pembangunan.
2. Masih belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Desa Kemuning Muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Kurangnya Pengawasan yang dilakukan Penghulu Kampung Kemuning Muda dalam pembangunan di Desa Kemuning Muda, karena masih adanya pekerjaan pembangunan infrastruktur yang belum dapat diselesaikan tepat waktu .Contohnya: keterlambatan penyelesaian proyek pembuatan irigasi air atau turap di desa.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena empiris yang penulis temukan dilapangan yaitu di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungarya Kabupaten Siak sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul : “Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”. Berfokus pada

pembangunan fisik di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

B. Perumusan Masalah

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa atau Kampung secara maksimal peranan Penghulu Kampung dalam memimpin dan mengarahkan Masyarakat Kampung kepada ketentuan-ketentuan yang telah dilihat, bahwa Penghulu Kampung sangat berperan penting bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kampung. Kemajuan pembangunan Kampung untuk menunjang sesuatu Kampung menjadi Kampung yang mandiri untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Bertolak dari permasalahan yang ada dengan melihat fakta dan fenomena yang ada dilokasi penelitian dan guna memudahkan arah penelitian ini, penulis merumuskan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

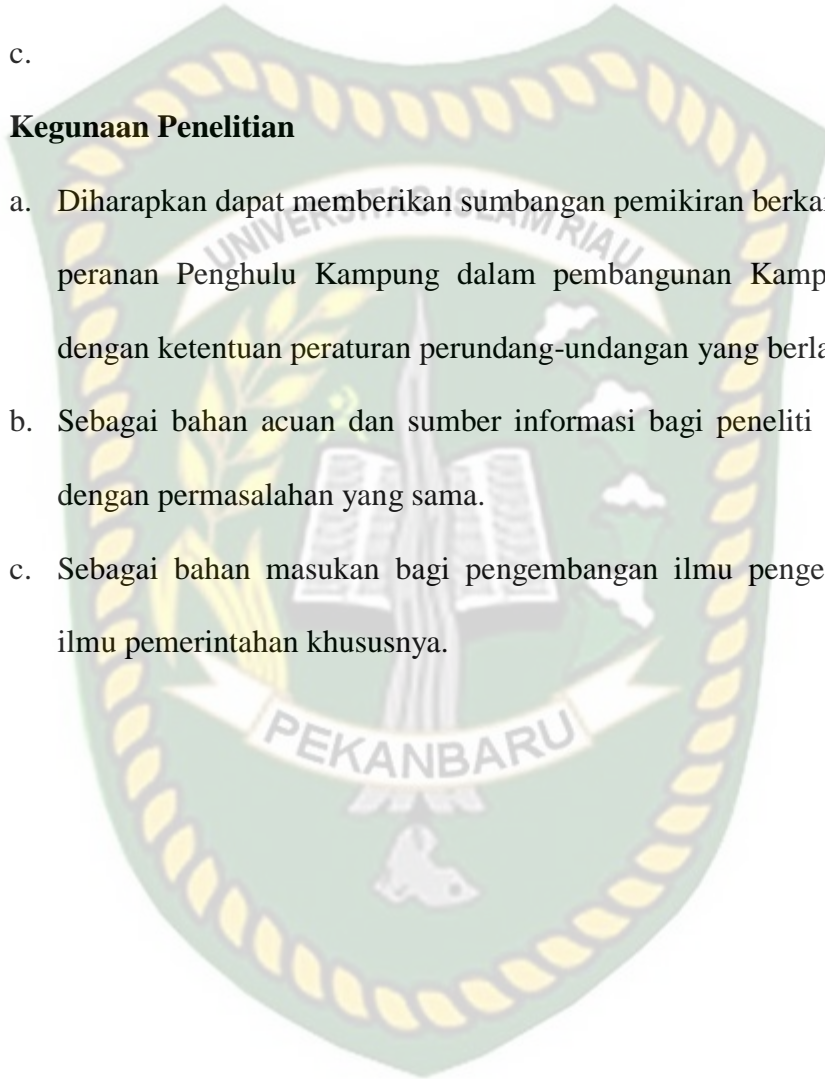
- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan pengulu kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

- b. Memberikan gambaran tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pembangunan Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

c.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan peranan Penghulu Kampung dalam pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pemerintahan khususnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan konsep-konsep dan landasan teori serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemerintah, evaluasi, kebijakan, perencanaan dan pembangunan dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian peneliti yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik, semoga yang menjadi acuan dari penelitian ini tidak keluar dari kerangka dan tujuan penelitian yang dimaksud.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintahan” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (dalam Syafi’e, 2011:5)

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat;
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah;
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat; dan
- d. Anantara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (syafiie, 2011:5).

Menurut Syafi'e (2011:20) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, diajarkan, sistematis serta spesifik/khas.

Ilmu pemerintahan menurut Syafi'e (2011:23) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurus (eksekutif), pengaturan (legislaif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (dalam Syafi'e, 2011:8) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rasyid (2005:13) lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar.

Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo 2010:34) dalam Pemerintahan Modern Rasyid Membagi fungsi Pemerintahan menjadi empat bagian yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan (*public servic*);
- b. Pembangunan (*development*);
- c. Pemberdayaan (*empowering*) dan;
- d. Pengaturan (*regulation*).

Rasyid Mengungkapkan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihat pemerintahnya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintahannya yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengansendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang harus dilakukan oleh pemerintahan.

Menurut Yusri Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materilnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintah/Negara.

Menurut Ndraha (2003:6) Pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan harapan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintah pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan menurut (Musaneef 1997:8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antar dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, definisi Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah oleh DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah Menurut (Undang-Undang Desa 2014:5)

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas dan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintahan Daerah Menurut (Undang-Undang Desa 2014:5) Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menurut (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2016: 4) peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama bupati/ walikota.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan, merupakan proses pemberian, bimbingan kepemimpinan, pengaturan dan pengendalian yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Hikmat (dalam Sudaryono 2017: 5) menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah ilmu dan seni pengorganisasian dan memimpin usaha manusia, menerapkan pengawasan dan pengendalian tenaga, serta memanfaatkan bahan alami bagi kebutuhan manusia.

Menurut Manulang (dalam Sudaryono 2017: 5) menyatakan bahwa manajemen adalah adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004:1) Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut George R. Terry (dalam Manullang 2004: 3) mengatakan manajemen adalah hasil pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain.

Dalam menggerakkan organisasi, seseorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Menurut Sallam (2007:176) Manajemen Pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan administrasi pemerintahan dan manajemen pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar tersebut disebut dengan asas-asas pemerintahan.

4. Konsep Kepemimpinan

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan sebagai pemimpin adalah semua orang-orang yang disertai tugas dan tanggung jawab seperti halnya bapak / ibu dalam rumah tanggapun juga disebut pemimpin.

Keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya, kemahiran, serta kejelian untuk mengerti dan memahami keadaan masyarakat dimana berlangsung proses kepemimpinan itu.

Ndraha (2001:216) menjelaskan kepemimpinan adalah gejala sosial. Kemampuan sesuatu (satu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga (agar) perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi integrative. Dalam situasi integrative itu, seseorang menjadi akseptabel bagi orang lain, *wennes* terbentuk. Orang yang (terbukti) memiliki kemampuan disebut pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak *given*, melainkan *achived*. Hasil kegiatan memimpin suatu unit kerja disebut pimpinan (sama seperti hasil pekerjaan memasak tersebut masakan).

Selain itu Soekanto (2012: 250) menjelaskan kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang (pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain

(yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Sedangkan Nawawi (2003: 306) fungsi pemimpin adalah agar bisa membina, memotivasi, mengarahkan dan memberikan kepercayaan kepada individu-individu dalam organisasi. Hal ini dikarenakan individu-individu sangat menentukan menentukan sukses dan gagalnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi tidak dapat menunggu untuk mendapatkan individu-individu dalam organisasi yang cakap sesuai yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Oleh sebab itulah, seorang pemimpin harus dapat memberdayakan bawahan / staf agar semaksimal mungkin individu-individu yang ada dan bekerja dalam organisasi dapat professional serta bekerja sama mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut George R. Terry (dalam Kartini Kartono, 2009:57) menyatakan bahwa Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.

Selanjutnya kartini kartono (2009: 80) menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas:

a. Tipe Kharismatik

Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan yang maha kuasa.

b. Tipe Paternalistik

Tipe Kepemimpinan dengan sifat-sifat antara lain:

1. Menganggap bawahannya belum dewasa.
2. Bersikap terlalu melindungi.
3. Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan.
4. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.

c. Tipe Otoriter

Dalam tipe ini pemimpin mempunyai sifat-sifat:

- a) Pemimpin organisasi sebagai miliknya.
- b) Pemimpin bertindak sebagai diktator.
- c) Cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman.

d. Tipe Militeristik

Dalam tipe ini pemimpin mempunyai sifat-sifat:

- a) Menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku.
- b) Lebih banyak menggunakan system perintah.
- c) Menghendaki keputusan mutlak dari bawahan.
- d) Formalitas yang berlebih-lebihan.
- e) Tidak menerima saran dan kritik dari bawahan.
- f) Sifat komunikasinya hanya sepihak.

e. Tipe Demokrasi

Tipe demokrasi mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu, mau mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya

membangun. Jadi pemimpin menitik beratkan pada aktifitas setiap anggota kelompok, sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktifitas, yang dimulai penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan, disiplin.

Penghulu Kampung harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan diatas maka penghulu Kampung harus dapat menjalankan program pembangunan di Kampungnya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmosudirdjo (2002: 212) bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok:

- a. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan daripada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban.
- b. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.
- c. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
- d. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua factor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan dari kutipan diatas, jelaslah kepemimpinan Penghulu kampung atau kepala Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang pancasialis sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ugal-ugalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.

Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerjasama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan wewenang formil tertentu. Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Penghulu Kampung atau Kepala Desa harus peka terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru.

5. Konsep Gaya kepemimpinan

Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang digunakan pemimpin didalam memperingati para pengikutnya. Ada banyak pendapat para ahli tentang defenisi gaya kepemimpinan, salah satunya adalah menurut Thoha (2012:303) gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi prilaku orang lain seperti yang ia lihat.

Gaya kepemimpinan yaitu sikap dan tindakan yang dilakukan pemimpin dalam menghadapi bawahan. Ada dua macam gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan gaya kepemimpinan yang

berorientasi pada bawahan. Dalam gaya yang berorientasi pada tugas ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemimpin memberikan petunjuk kepada bawahan.
- b. Pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahan.
- c. Pemimpin meyakinkan kepada bawahan bahwa tugas-tugas harus dilaksanakan sesuai dengan keinginannya.
- d. Pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas daripada pembinaan dan pengembangan bawahan.

Sedangkan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemimpin lebih memberikan motivasi daripada memberikan pengawasan kepada bawahan.
- b. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan
- c. Pemimpin lebih bersifat kekeluargaan, saling percaya dan kerja sama, saling menghormati di antara sesama anggota kelompok.

Menurut Reddin (dalam Kartono, 2014:34) untuk menentukan watak dan tipe pemimpin atas tiga pola dasar, yaitu:

- a. Berorientasi tugas (*task orientation*)
- b. Berorientasi hubungan kerja (*relationship orientation*)
- c. Berorientasi hasil yang efektifitas (*effectivees orientation*)

Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini, ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya, yakni perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung.

Perilaku mengarahkan dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu ini antara lain, menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan bawahan, memberitahukan bawahan tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut, bagaimana melakukannya, dan melakukan pengawasan secara ketat kepada pengikutnya.

Perilaku mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi, dan melibatkan para pengikutnya dalam pengambilan keputusan.

Ada 4 gaya dasar kepemimpinan seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar II. 1: Empat Gaya Dasar Kepemimpinan



Sumber: Miftah Thoha, (2015:56)

Keempat gaya dasar diatas dapat diidentifikasi dengan suatu proses pengambilan keputusan dan diketahui 4 perilaku pemimpin, yakni:

1. G1 dirujuk sebagai instruksi.
2. G2 dirujuk sebagai konsultasi.
3. G3 dirujuk sebagai partisipasi.
4. G4 dirujuk sebagai delegasi.

Sebagai pengembangan, maka para ahli berusaha agar dapat menentukan mana diantara kedua gaya kepemimpinan itu yang paling efektif untuk kepentingan organisasi atau perusahaan, itu yang paling efektif untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Salah satu pendekatan yang dikenal dalam memahami perilaku pemimpin adalah konsep empat sistem manajemen yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Empat sistem tersebut terdiri dari:

a. Sistem 1

Dalam sistem ini pemimpin bergaya sebagai *exploitive-authoritative*, manajer dalam hal ini sangat otokratis, mempunyai sedikit kepercayaan kepada bawahannya, suka mengeksploitasi bawahan, dan bersikap paternalistik. Cara pemimpin dalam memotivasi bawahannya adalah dengan memberi ketakutan dan hukuman-hukuman, kadang-kadang diselingi pemberian penghargaan (*occasional rewards*). Pemimpin dalam sistem ini hanya membatasi proses pengambilan keputusan ditingkat atas saja.

b. Sistem 2

Dalam sistem ini pemimpin dinamakan oktratis yang baik hati (*benevolent authoritative*). Pemimpin atau manajer-manajer yang termasuk dalam sistem ini

mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang terselubung, percaya pada bawahan, mau memotivasi dengan hadiah-hadiah dan ketakutan berikut hukuman-hukuman, memperbolehkan adanya komunikasi keatas, mendengar pendapat-pendapat, ide-ide dari bawahan, dan memperbolehkan adanya delegasi wewenang dalam proses keputusan. Bawahan merasa tidak bebas untuk membicarakan sesuatu yang bertalian dengan tugas pekerjaannya dengan atasannya.

c. Sistem 3

Dalam sistem ini gaya kepemimpinan lebih dikenal dengan sebutan *manager consultative*. Manajer dalam hal ini mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan biasanya kalau ia membutuhkan informasi, ide atau pendapat bawahan, dan ingin melakukan dan pengendalian atas keputusan-keputusan yang dibuatnya. Pemimpin dengan gaya ini mau melakukan motivasi dengan penghargaan dan hukuman yang kebetulan, dan juga berkehendak melakukan partisipasi.

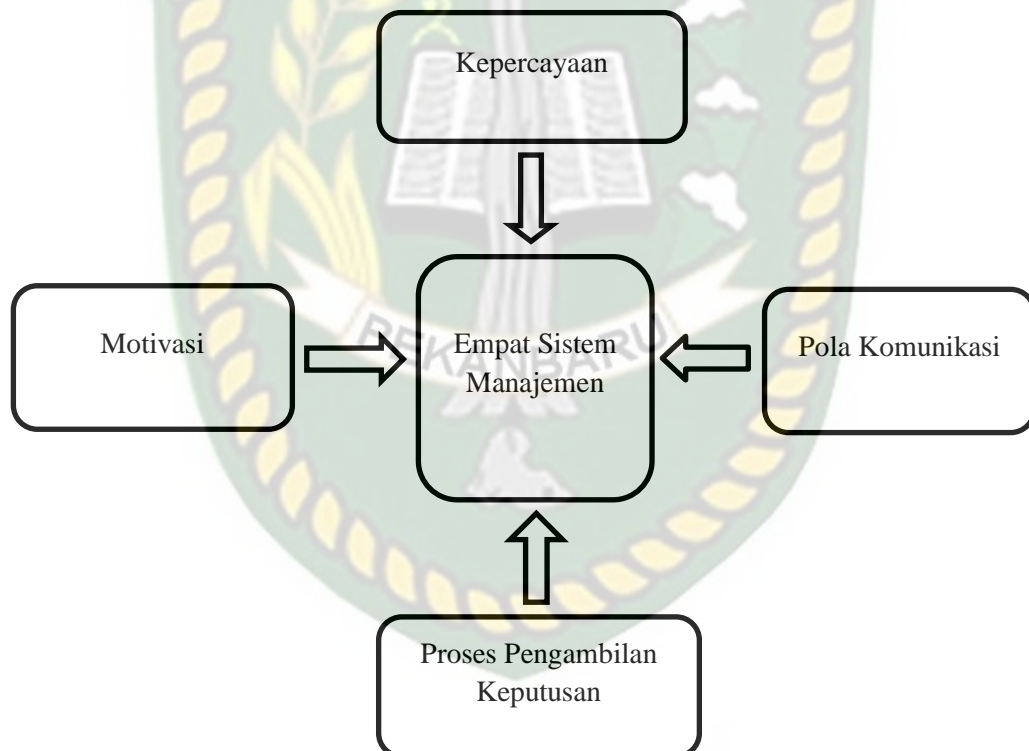
d. Sistem 4

Oleh Likert sistem ini dinamakan pemimpin yang bergaya kelompok berpartisipatif (*participative group*). Dalam hal ini manajer mempunyai kepercayaan yang sempurna terhadap bawahannya. Dalam setiap persoalan, selalu mengandalkan untuk mendapatkan ide-ide dan pendapat-pendapat lainnya dari bawahannya. Memberikan penghargaan yang bersifat ekonomis, dengan berdasarkan partisipasi kelompok dan keterlibatannya pada setiap urusan terutama dalam penentuan tujuan bersama dan penilaian kemajuan pencapaian tujuan tersebut. Pemimpin juga mau mendorong bawahan untuk ikut bertanggung jawab

membuat keputusan, dan juga melaksanakan keputusan tersebut dengan tanggungjawab yang besar. Bawahan secara mutlak mendapat kebebasan untuk membicarakan sesuatu yang bertalian dengan tugasnya bersama atasannya.

Dalam membentuk kesatuan sistem pada empat sistem yang dikemukakan oleh Likert terdapat prinsip utama yang menjadi landasan pokok terbentuknya gaya kepemimpinan pada sistem tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II. 2: Prinsip Utama Yang membentuk Gaya Kepemimpinan Pada Teori Empat Sistem Manajemen Rensis Likert.



Sumber: hasil modifikasi penulis, 2020

Berikut sedikit uraian tentang prinsip utama yang membentuk gaya kepemimpinan pada teori empat sistem manajemen Rensis Likert:

a. Kepercayaan terhadap bawahan.

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan dalam kepemimpinan adalah penting karena memungkinkan tim untuk bersedia menerima dan berkomitmen terhadap berbagai tujuan dan keputusan pemimpin mereka. Jadi, kepercayaan merupakan sebuah proses yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pihak lain akan menghormati komitmen mereka dan bahwa pihak lain memiliki niat yang baik kepada mereka.

b. Cara pemimpin memotivasi bawahan.

Motivasi diartikan juga sebagai suatu kekuatan sumber daya yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia. Menurut Robbins (2001:164) motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada empat sistem manajemen dari Likerrt ini diketahui bahwa metode yang digunakan untuk memotivasi adalah penghargaan dan hukuman. Jadi 2 hal ini yang akan dipergunakan sebagai batasan motivasi dalam penelitian ini.

Reward dan *punishment* merupakan suatu konsep yang dikembangkan dari suatu konsep manajemen sumber daya manusia, terutama diajukan dalam rangka memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Kedua metode ini sudah cukup lama dikenal dalam dunia kerja. Tidak hanya dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan pun kedua ini kerap kali digunakan. *Reward* dan *punishment* juga sering disebut dengan manajemen bonus dalam suatu

organisasi, dan menjadi prioritas dalam mengambil penilaian terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh pemimpin.

6. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Awang (2010: 49) pemerintahan secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan, dan melindungi berbagai kehidupan mereka.

Widjaja (2002: 65) menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Selain itu Widodo (2001: 2) pemerintahan lokal merupakan pemerintahan yang didekatkan dengan rakyat. Dengan demikian akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, pemasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang dibuat akan mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Diantara tugas yang terpenting Negara (*state*) pada masa kedepan yang yang diciptakan oleh kepentingan politik (*political Environment*) adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable Development*) dengan mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam mengintegrasikan social, ekonomi, lingkungan, ketentraman, dalam masyarakat (*The vulnerable in the population*), menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokrasi

pemerintahan, memperkuat financial dan kepastian aministratif pemerintahan lokal.

Menurut Nurcholis (2001: 2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatife sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

7. Konsep Pembangunan

Menurut Siagian (2012: 4) Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan Bangsa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang “Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”. Juga pernah diteliti sebelumnya, namun tetap ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian
1.	ARDI PRANATA NPM: 137310466	2017	Evaluasi Tugas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2.	HARTONO NPM: 157310183	2019	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Singingi.
3.	SINTIA WULANSARI NPM: 147310504	2019	Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
4.	WIWITRI NPM: 137310745	2017	Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan referensi pada penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan yakni terletak pada fokus pembinaan pada pegawai-pegawai yang ada di kantor Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep-konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar II. 3: kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep operasional

Konsep merupakan defenisi yan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkat generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu dikukur.

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsepnya yaitu:

1. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.
2. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.
3. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.
4. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan.
5. Gaya kepemimpinan adalah perilaku sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bersarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan Berada di daerah Kabupaten.

7. Tipe Kharismatik, Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan yang maha kuasa.
8. Tipe Otoriter, tipe ini pemimpin mempunyai sifat-sifat: Pemimpin organisasi sebagai miliknya, Pemimpin bertindak sebagai dictator, Cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman.
9. Tipe Demokrasi, tipe demokrasi mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu, mau mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Jadi pemimpin menitik beratkan pada aktifitas setiap anggota kelompok, sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktifitas, yang dimulai penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan, disiplin.
10. Kualitas kerja adalah hasil yang bisa diukur dari tingkat efisiensi dan efektivitas seorang pegawai dalam melakukan suatu yang didukung oleh sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi secara umum.
11. Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu.
12. Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecendrungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya.

E. Operasional Variabel

Untuk lebih jelasnya mengenai operasional variabel mengenai penyelenggaraan pembangunan di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Tabel II. 2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Miftah Thoha (2015:56)	Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak	1. Intruksi 2. Konsultasi 3. partisipasi 4. Delegasi	a. Memeberikan petunjuk b. memeberikan arahan a. Memeberikan Nasehat b. Memeberikan Saran/ Pertimbangan a. Mengikutsertkan masyarakat dalam pembangunan Sarana dan Prasarana b. Keterlibatan dalam kegiatan Masyarakat a. Memberikan sebagian wewenang kepada anggota b. Mempercayai kepada staff dalam menyelesaikan tugas

Sumber: Olahan Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penelitian maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif, yang mana melakukan penelitian langsung ke Desa/Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak guna mendapatkan gambaran yang tepat, jelas, dan terperinci bagaimana permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti.

Metode penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, Singarimbun (2006: 86) menyatakan bahwa cara yang terbaik di tempuh dengan jalan mempertimbangkan teori dalam melihat di lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan di lapangan. Sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, tenaga, dan biaya perlu menjadi pertimbangan.

Dari uraian diatas maka penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi dalam Gaya Kepemimpinan Pengulu Kampung Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kampung Kemuning Muda yang belum terlaksana dengan baik dan jauh dari harapan masyarakat selama ini. Kampung Kemuning Muda merupakan salah satu Desa atau Kampung yang ada di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, untuk menuju Kampung Kemuning Muda ditempuh dengan jarak + 34 menit yang dimana melewati banyaknya persawahan yang luas.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan suatu istilah dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan keterangan kepada penelitian ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: penghulu kampung, beberapa staf desa, beberapa masyarakat Kampung Kemuning Muda.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah peneliti serta sampel yang sudah ditetapkan dan sudah mewakili untuk memberikan jawaban peneliti.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Penghulu Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Untuk

melihat Informan dan key Informan didalam penelitian ini, maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel dan penjelasannya seperti dibawah ini:

Tabel III. 1: Keadaan Informan dan Key Informan

No.	Nama	Usia	Jabatan	Keterangan
1.	Amin Soimin	50	Camat	Informan
2.	Turyanto. S.Pd	41	Ketua BPD	Informan
3.	Mujiran	45	Penghulu Kampung	Key Informan
4.	Darman	48	RW	Informan
5.	M. Arifin	39	RT	Informan
6.	Suyatno	34	Kepala Dusun 1	Informan
7.	Mujianto	38	Kepala Dusun 2	Informan
8.	Sujakun	45	Kepala Dusun 3	Informan
9.	Basuki	64	Tokoh Masyarakat	Informan
Jumlah				

Sumber : kantor Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dengan wawancara secara langsung dilaksanakan dengan mengambil informan dari Penghulu Kampung, di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

2. Data Skunder

Merupakan data yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan obyek penelitian yang berupa naskah, buku-buku, literature,

laporan/catatan institusi dan lain-lain. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber yang dapat menunjang objek yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap diperlukan oleh penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

1. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dimana sipeneliti terlibat langsung dalam lingkungan atau tempat populasi yang diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, mencatat, dipertimbangkan kemudian melakukan penelitian terhadap data yang telah di observasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Kegiatan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan responden dilokasi penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan alih dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi seperti monografi Desa dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh lalu dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, yaitu menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan, kemudian diuraikan dalam bentuk tabel sesuai dengan identitas responden masing-masing secara indikator variabel dengan tipe kualitatif dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal dan Kegiatan Penelitian

Tabel III. 2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020															
		Juli-Agust				Sept-Okt				Nov-Des				Janua-Febr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Perbaikan hasil seminar																
4	Penelitian Lapangan																
5	Pengelolaan Data																
6	Bimbingan Skripsi																
7	Ujian Skripsi																
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																
9	Penyerahan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum kabupaten Siak

1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 Km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 Kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di kota Siak SriIndrapura. Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2014 memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak diantara 16°30'LU-02°49'LU dan 100°54'21"BT-102°14'59"BT, yang sebagian besarnya terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran

mencakup sekitar 60% Wilayah Kabupaten Siak. Morfologi perukitan rendah terdapat di bagian utara, timur dan memanjang dari arah barat laut sampai tenggara.

3. Topografi

Kabupaten Siak terdiri dari satuan daratan rendah dan satuan perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dengan ketinggian 0-50 meter dari permukaan laut, meliputi dataran banjir sungai dan rawa serta terbentuk endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0-3 atau bisa dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 meter dari daerah sekitarnya dengan kemiringan 3-15.

4. Geologi

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang tersusundari batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk didominasi oleh batuan lempung, silika, batu pasir dan batu lapis. Formasi ini terdapat di daerah Minas.

5. Klimatologi

Berdasarkan letak astronomis, seluruh Kabupaten Siak bila dilihat dari iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehingga iklim yang berlaku di daerah ini juga iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25°C sampai dengan 32°C dan kelembaban udara 88,9% perbulan.

B. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud

Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasid daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan.

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembalilagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan AssyaidisSyarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan kekota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masapemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Danmasa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dansedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru padatahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelarAssayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengannama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan

sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siakdi bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapuraberdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

C. Visi dan Misi Kabupaten Siak

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, danSejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayuserita sebagai kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi RiauTahun 2016. Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan daerah Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakatdan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di wilayah Kabupaten Siak.

- b. Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, ditandai dengan tingginya tingkat kesehatan masyarakat yang prima sehingga menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi
- c. Masyarakat yang cerdas, ditandai dengan tingginya inovasi, kreatifitas dan daya tanggap terhadap situasi yang ditunjang oleh tingginya derajat pendidikan.
- d. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan dan Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- e. Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu, ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama. Perwujudan masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilai-nilai keislaman (sebagai agama mayoritas) dalam kehidupan masyarakat dan sebagai landasan spiritual pembangunan daerah serta dengan mewujudkan budaya melayu sebagai sarana cultural kehidupan masyarakat.
- f. Mewujudkan pelayanan publik terbaik dilakukan dengan mengimplementasikan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pelayanan dasar dan perizinan, serta secara bertahap meningkatkan mutu standar pelayanan menjadi pelayanan prima sehingga menjadi yang terbaik di Provinsi Riau.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam yang terbarukan.
- c. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.
- d. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
- e. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa

D. Sejarah Singkat Dan Keadaan Geografis Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Kabupaten Siak pada awalnya adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bengkalis. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 53 tahun 1999, maka terbentuklah kabupaten baru di provinsi Riau yaitu Kabupaten Siak dengan pusat pemerintahan berada di kota Siak Sri Indrapura. Dan memiliki beberapa Kecamatan salah satu diantaranya yaitu Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Bungaraya adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Siak Sri Indrapura yang berjarak lebih 20 Km dari pusat Kabupaten.

Kecamatan Bungaraya merupakan pemekaran dari kecamatan Sungai Apit yang dahulunya salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Apit. Dengan dimekarkannya Kecamatan Bungaraya menjadi 14 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Tualang, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Kandis, Kecamatan Koto Gasip, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Mempura, Kecamatan Sabak Auh, dan Kecamatan Pusako. Adapun tujuan Pemerintah dalam pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintah kecamatan. Dengan adanya perkembangan pada tahun 2002 maka terbentuklah Desa atau kampung Kemuning Muda yang dipimpin oleh kepala Desa yang pertama yaitu Bapak Mahmud. Setelah masa jabatan 5 tahun selesai maka jabatan kepala Desa dipimpin oleh Bapak Narsim. Setelah masa jabatan 5 tahun selesai maka ganti lagi jabatan yang

dipimpin oleh bapak Mujiran, yang sekarang masih menjabat sebagai Kepala Desa atau penghulu Kampung Kemuning Muda.

Dilihat dari bentang wilayah, Kampung Kemuning Muda memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kampung Jati Baru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bungaraya
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Buantan Lestari
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tuah Indrapura

Dari data diatas mengenai letak wilayah dan geografi Kampung Kemuning Muda. Penulis bertujuan agar pembaca mengetahui dimana penelitian tentang Gaya Kepemimpinan. Adpaun penelitian yang penulis lakukan dengan jarak 5 menit perjalanan dari pusat Kampung.

1. Keadaan Penduduk Masyarakat Kampung Kemuning Muda

Penduduk merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan Desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penggerakan tujuan pembangunan. Penduduk juga dikatakan sebagai modal dasar pembangunan yang merupakan sumber manusia yang dapat menggerakkan dan mengolah sumberdaya alam sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Penduduk kecamatan Bungaraya terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya suku melayu, minang, cina, dan jawa. Namun dari berbagai suku tersebut, mayoritas penduduk kecamatan Bungaraya bersuku Jawa. Dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak ini ialah berkebun seperti perkebunan sawit, karet dan ada juga berladang persawahan.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bungaraya Berdasarkan Desa

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Bunga raya	3.432
2	Jayapura	2.729
3	Jatibaru	2.996
4	Tuah Indraputra	2.704
5	Buantan Lestari	1.993
6	Langsat Permai	1.400
7	Kemuning Muda	2.423
8	Temusai	1.030
9	Suak merambai	1021
10	Dayang Suri	1532
Jumlah		

Sumber : Kantor Camat Bunga Raya, 2020

Berdasarkan data pada tabel IV.1 diatas dapat kita ketahui bahwa di Kecamatan Bunga raya terdapat 10 desa , dengan Desa Bunga raya yang memiliki penduduk terbanyak sebesar 3.432 orang dan desa Suak merambai dengan penduduk paling sedikit sebanyak 1.021 jiwa

2. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang berada pada Desa/Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 2 : Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	2
3.	SD/ Sederajat	1
4.	SMP/Sederajat	-
5.	SMA/Sederajat	1
6.	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	-
7.	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	-
Jumlah		5

Sumber : Kantor Desa Kemuning Muda, 2021

F. Kepercayaan Masyarakat Desa Kemuning Muda

Kepercayaan masyarakat Desa Kemuning Muda lebih dominan beragama Islam. Dan juga terdapat beberapa agama lainnya seperti kristen, katolik, dan Budha namun masyarakat Desa Kemuning Muda tetap menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi beragama. Demi terciptakan kerukunan dalam bermasyarakat.

G. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

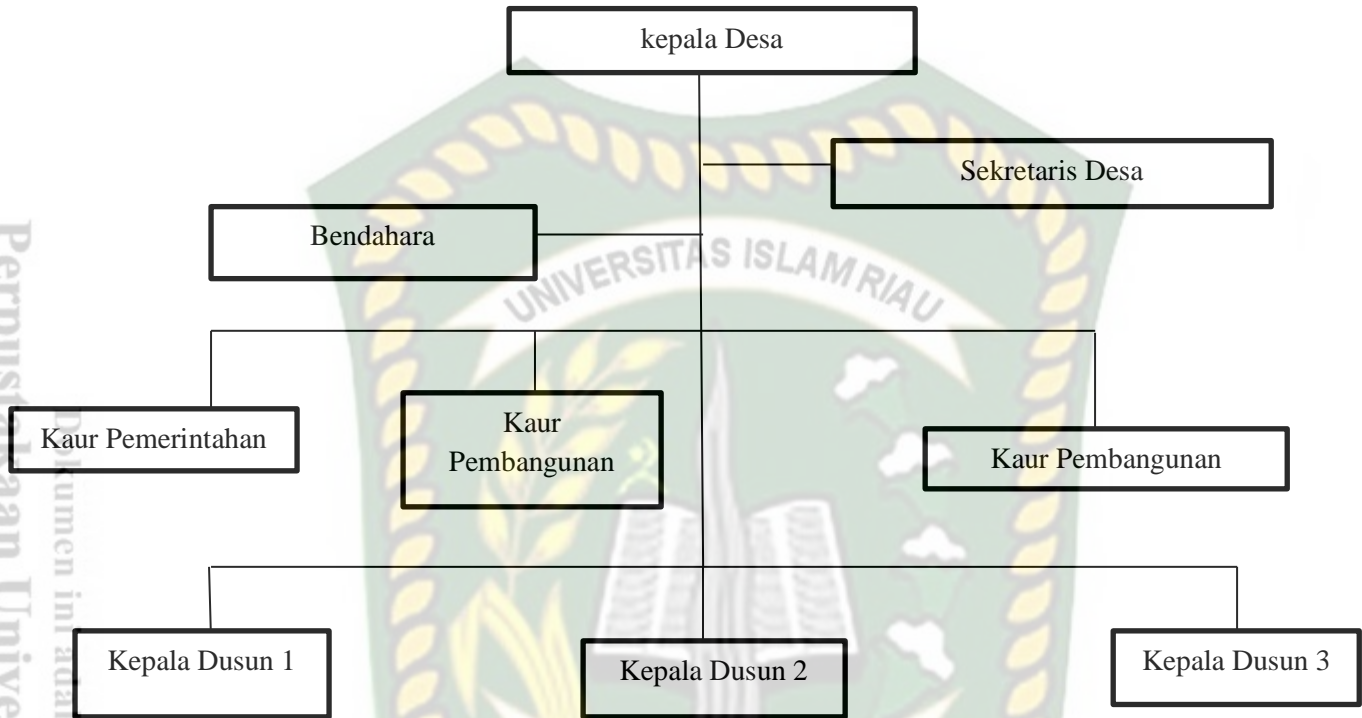
Yang menduduki jabatan structural pada pemerintahan Desa di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 9 orang dengan perincian berikut:

1. Kepala Desa/penghulu Kampung : 1 orang
2. Sekretaris desa/kerani : 1 orang
3. Kepala Dusun : 3 orang
4. Bendahara : 1 orang
5. Kaur Pemerintahan : 1 orang
6. Kaur Pembangunan : 1 orang

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintahan Desa di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Di Desa Kemuning

Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada penelitian ini pertama-tama akan diuraikan dahulu mengenai hal identitas yang menjadi responden penelitian. Melalui identitas responden inilah akan diketahui data yang diperoleh merupakan data yang betul-betul valid, bisa dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Identitas responden sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari responden dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas responden yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari : jenis kelamin, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan jabatan responden yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	9	100%
2	Perempuan		0%
Jumlah		0	100%

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat dilihat bahwa responden yang dijadikan sebagai key informan dan informan pada penelitian ini seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak orang atau 100.00%. sedangkan yang berjenis kelamin perempuan tidak ada.

2. Tingkat Usia Responden

Usia atau umur adalah salah satu factor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai usia responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	-	0%
2.	31 – 40	3	30%
3.	41 – 50	6	70%
Jumlah		9	100 %

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan tingkat usianya. Responden dengan tingkat usia terbanyak adalah antara

3. Tingkat pendidikan Responden

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembangkan kemampuan, perilaku dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan

tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	1	10%
4	SMA	4	50%
5	D1-D3	2	20%
6	D4-S1	3	20%
7	S2	-	-
8	S3	-	-
Jumlah		9	100 %

Berdasarkan tabel V.3 diatas, terlihat bahwa mayoritas responden ialah dengan tingkat Pendidikan SMA yaitu sebanyak 4 orang kemudian untuk tingkat pendidikan D4-S1 sebanyak 3 orang , untuk jenjang D1-D3 sebanyak 3 orang dan jenjang pendidikan SMP 1 orang.

B. Analisis Gaya Kepemimpinana Kepala Desa/Penghulu Kampung Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Dalam sub bahasa ini dianalisis mengenai tanggapan responden tentang gaya kepemimpinan penghulu kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di kampung kemuning muda kecamatan bungaraya kabupaten siak. Tanggapan dari responden ini berasal melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, didasari dari operasional variabel penelitian dalam bab sebelumnya yaitu pada bab II. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Intruksi

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau program Pemberian intruksi oleh Pemimpin sangat lah penting dalam pelaksanaannya yang bertujuan mendapatkan arahan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai target, Intruksi diartikan sebagai pemberian arahan secara jelas dan rinci mengenai urutan suatu kegiatan yang melibatkan hanya satu jabatan atau unit kerja sebagai pelaksana (Arini T:2014).berasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (2) huruf h berbunyi “membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.” Sebagai seorang pemimpin di desa Kemuning Muda, desa harus membuat perencanaan yang menyeluruh terhadap manajemen pemerintah dan bagian dirinya sendiri selaku penanggung jawab demi tercapainya tujuab-tujuan untuk kemajuan desa. Kepala desa haruslah membuat perencanaan didalam menentukan arah atau tujuan pembangunan, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut secara efektif dan efesien,berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan di Kampung Kemuning muda Pada indikator Pemberian Intruksi ini di jabarkan menjadi dua bagian antara lain pemberian Petunjuk dan Pemberian Arahan. maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Memberikan Petunjuk

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti memberikan petunjuk diartikan sebagai suatu usaha yang di lakukan oleh Penghulu Kampung Kemuning muda Kepada Lembaga Kemasyarakatannya tepatnya RT dan RW

serta kepada Kepala Dusun 1,2 dan 3 kampung Kemuning muda ini untuk memberi tahu atau sesuatu terkait dengan Pembangunan insfrastrutur di Kampung Kemuning muda. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Februari 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Petunjuk dan arahan tu telah saya berikan tekita kami melakukan musyawarah, di situ kami jelaskan pembangunan yang akan di lakukan di kampung Kemuning muda ini, seperti pembangunan saluran irigrasi di beberapa Dusun yang ada di kampung kemuning muda , yang mana saluran irigrasi ini sangat penting di kampung kita salah satunya untuk melancarkan aliran air ke lahan sawah, mencukupi kebutuhan air pada lahan pertanian, mempermudah para petani untuk mengairi lahannya dan sebagai salah satu sarana pendukung ketahanan pangan. Dan pembangunan ini kami rencanakan akan melibatkan segenap masyarakat kampung kemuning,hal ini juga bisa menambah pendapatan masyarakat setempat” (Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui terkait dengan indikator memberikan intruksi berupa arahan oleh penghulu Kampung Kemuning muda ini, bahwa penghulu telah memberikan arahan baik kepada lembaga kemasyarakatannya kepada dusun dan masyarakat dalam musyawarah yang di laksanakan di balai kampung,terkait dengan pembangunan infrastruktur berupa saluran irigrasi di beberapa dusun yang ada di Kampung Kemuning muda dengan rencana akan melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaannya. Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021 , Mengatakan :

“terkait dengan Petunjuk yang diberikan oleh Pak Penghulu Kampung Kemuning Muda ini, memang pernah ia berikan ketika musyawarah dengan kami selaku masyarakat terkait dengan pembangunan saluran irigrasi di beberapa dusun di Kampung Kemuning muda ini, manum permasalahannya saat ini, beliau pernah mengatakan akan memberdayakan masyarakat

setempat dalam pembangunan saluran irigrasi ini namun dalam kenyataannya masyarakat setempat tidak di ikut sertakan dalam pembangunan tersebut,” (Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan pemberian arahan oleh Penghulu Kampung Kemuning Muda ini terkait dengan pembangunan infrastruktur telah di lakukan di saat musyawarah yang di lakukan dengan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampung Kemuning muda namun ada beberapa petunjuk yang di sampai tidak sesuai dengan kenyataannya seperti tidak mengikut sertakan masyarakat dalam pengerjaan saluran irigrasi tersebut.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan melihat yaitu kepala Desa Kampung Kemuning Muda dalam menentukan arah, tujuan, dan sasaran pembangunan telah melakukan musyawarah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ini terlihat dari tindakan masyarakat yang banyak tidak hadir pada saat musdes dilakukan.

b. Pemberian Arahan

Pemberian arahan ini masih berkaitan dengan pemberian Petunjuk Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti memberikan arahan ini masih sama diartikan sebagai suatu usaha yang di lakukan oleh Penghulu Kampung Kemuning Muda Kepada Lembaga Kemasyarakatannya tepatnya RT dan RW , Kepala Dusun 1,2 dan 3 serta Tokoh masyarakat ini untuk memberikan tahu atau sesuatu terkait memberi tahu atau sesuatu terkait dengan Pembangunan

infrastruktur di Kampung Kemuning muda. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Februari 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“ ya.. seperti tadi pemberian arahan ni masih masa seperti pemberian petunjuk konteksnya masih sama kami berikan arahan terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berupa saluran irigrasi di kampung kemuning Muda tepatnya di beberapa dusun seperti dusun 1,2 dan 3 di kampung Kemuning Muda” (Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Februari 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan pemberian arahan ini masih berkaitan dengan dengan pemberian petunjuk yang di bahas sebelumnya yakni untuk arahan ini telah di berikan oleh Penghulu Kampung Kemuning Muda kepada Tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatannya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di kampung tersebut salah satunya pembangunan saluran irigrasi di Dusun 1 ,2 dan 3. Sesuai dengan kita akan melihat hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021 , Mengatakan :

“sama halnya dengan sebelumnya terkait dengan pemberian arahan ini sama dengan pemberian petunjuk, penghulu memberikan arahan kepada kami di saat musyawarah pada waktu itu untuk kami ikut turut ikut serta dalam pembangunan namun kenyataannya kami tidak di ikut sertakan hanya beberapa masyarakat yang ada di kampung ini yang ikut serta dalam pembangunan tersebut.” (Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas terkait dengan Pemberian arahan oleh Penghulu Kampung Kemuning Muda ,pemberian arahan masih terkait dengan petunjuk yang di bahas sebelumnya bahwa arahan di berikan ketika di adakan rapat dengan tokoh masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Kampung

Kemuning Muda ini, dan pada dasarnya Penghulu memberikan arahan bahwa masyarakat akan diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan melihat yaitu kepala Desa Kampung Kemuning Muda dalam menentukan arah, tujuan, dan sasaran pembangunan telah melakukan musyawarah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ini terlihat dari tindakan masyarakat yang banyak tidak hadir pada saat musdes dilakukan.

2. Konsultasi

Konsultan diartikan sebagai orang (ahli) yang bertugas memberikan petunjuk, atau nasehat dalam suatu kegiatan. Kata “Berkonsultasi” diartikan sebagai bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu dan meminta nasehat. Konsultasi merupakan kegiatan berbagi pemahaman dan kepedulian yang relevan dalam upaya membangun kesamaan persepsi dan memperoleh dukungan yang diharapkan dalam memperlancar pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Khandani (2016:53) sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban, pada Huruf g berbunyi “Menjalin Kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku Kepentingan di Desa.

Terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti tentang Gaya kepemimpinan Penghulu Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga raya

Kecamatan Siak, pada indikator Konsultasi ini bisa diartikan sebagai Penghulu Kampung Kemuning Muda dalam Pemberian nasehat dan juga Pemberian saran dan Pertimbangan,terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di desa Kemuning, Nasehat , saran dan pertimbangan sangat lah penting yang di berikan oleh Kepala Penghulu selaku penghulu dan juga pihak yang mengawasi pembangunan fisik yang dilakukan di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Pemberian Nasehat

Memberikan nasehat berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh Peneliti ini diartikan sebagai sebuah pemberian masukan yang di lakukan oleh Penghulu Kampung Kemuning Muda terkait dengan pembangunan fisik di Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak, Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Februari 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“untuk nasehat atau masukan yang saya sampaikan kepada masyarakat khususnya warga kampung Kemuning Muda , dalam hal ini kampung kita sedang melaksanakan pembangunan fisik, berupa semenisasi, Pembangunan Kios pasar dan Saluran Irigrasi, saya berharap masyarakat bisa turut mensukseskan pembangunan kampung kita ini dengan cara berpartisipasi dalam pembangunan tersebut” (Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Februari 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Nasehat yang di berikan Penghulu Kampung Kemuning Muda kepada masyarakat setempat bahwa , masyarakat diharapkan untuk bisa memsukkseskan pembangunan di kampung Kemuning Muda dengan cara turut berpartisipasi dalam

pembangunan tersebut. Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin, 22 Januari 2021, Mengatakan :

“terkait dengan nasehat yang diberikan oleh bapak Penghulu Kampung Kemuning muda, beliau memberikan nasehat disaat di dalam forum musyawarah, penghulu meminta kami selaku masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di kampung Kemuning Muda ini, namun hingga saat ini kami selaku masyarakat belum ada di bina untuk ikut dalam pembangunan tersebut.” (Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin, 22 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan pemberian nasehat oleh Penghulu Kampung Kemuning Muda ini, masyarakat mengatakan bahwa hanya sebatas nasehat namun Penghulu tidak benar memberikan pembinaan masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan di Kampung Kemuning Muda ini.

b. Pemberian Saran/ Pertimbangan

Memberikan Saran/Pertimbangan berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh Peneliti ini diartikan sebagai sebuah pemberian saran yang di lakukan oleh Penghulu Kampung Kemuning Muda terkait dengan pembangunan fisik di Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak, Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Februari 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Saran dan Masukan itu saya rasa sangat penting ya, saran ini kan akan menjadi bahan pertimbangan terkiat dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang kita laksanakan, agar pembangunan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan dan hasilnya maksimal” (Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Februari 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dia atas dapat kita ketahui terkait dengan indikator pemberian saran/ pertimbangan ini terus di lakukan oleh penghulu bertujuan memberikan masukan terhadap pembangunan yang di laksanakan di Kampung Kemuning muda ini berjalan sesuai dengan aturan dan hasilnya maksimal. Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021 , Mengatakan :

“untuk saran juga kami selaku tokoh masyarakat di Kampung Kemuning Muda juga turut mengawasi pembangunan yang di laksanakan di Kampung ini tepatnya pembangunan fisik di beberapa dusun seperti pembangunan semenisasi serta pengambunan saluran irigrasi, ketika kami melihat ada beberapa pengerjaan yang tidak sesuai maka kami berikan saran juga” (Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui terkait dengan pemberian saran atau bahan pertimbangan ini masyarakat juga turun memberikan saran terhadap pembangunan yang di laksanakan di Kampung Kemuning Muda agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan.

3. Partisipasi

H.A.R. Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa Berwenang , Pada Huruf m berbunyi “

Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipasif”. Hal ini selaras dengan indikator yang di angkat oleh Peneliti bahwa dalam penyelenggaraan Pembangunan harus dilakukan secara partisipasif.

Terkait dengan Permasalahan yang di angkat oleh peneliti terkait dengan gaya kepemimpinan Penghulu Kampung Kemuning Muda dalam hal penyelenggaraan pembangunan di Kampung Kemuning Muda ini, partisipasi diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh Kepala penghulu untuk memberikan arahan bahwa masyarakat khususnya Kampung Kemuning muda untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan di kampung tersebut, partisipasi bisa dalam bentuk waktu, fisik, dll dalam indikator partisipasi ini terdapat dua sub indikator terkait antara lain, mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan sarana dan Prasarana , keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Mengikutsertakan Masyarakat dalam Pembangunan

Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah fungsi seorang pemimpin dalam memberdayakan masyarakatnya, terkait dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti terhadap pembangunan fisik di laksanakan di Kampung Kemuning Muda ,pemberdayaan masyarakat bisa di lakukan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan fisik di kampung Kemuning Muda. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“iya benar bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur di Kampung Kemuning Muda ini, masyarakat dapat kita berdayakan melalui mengikutsertakan dalam pembangunan ini, yang mana dengan ikut serta masyarakat dalam pembangunan fisik di Kampung Kemuning muda ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, disaat musyawarah dengan tokoh masyarakat dan kepala dusun , sudah saya sampaikan bahwa saya akan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan ini.” (Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan ini penghulu kampung kemuning muda ini ingin mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Kemuning Muda . Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021 , Mengatakan :

“untuk informasi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan ini sebelumnya memang benar telah di sampaikan oleh bapak penghulu, namun yang saya ketahui hingga saat ini hal tersebut belum terlaksanakan,” (Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui terkait dengan keikutserataan masyarakat dalam pembangunan di Kampung Kemuning Muda ini bahwa masyarakat belum diikut sertakan dalam pembangunan tersebut , hal ini tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Penghulu Kampung Kemuning Muda.

b. Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat

Pada indikator Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat ini,diartikan sebagai bagaimana cara Penghulu ikut serta dalam kegiatan masyarakat, hal ini bisa di lihat dari cara penghulu dalam memberdayakan masyarakat setempat, dalam hal

ini terkait dengan pembangunan yang di lakukan di Kampung Kemuning Muda ini bisa menjadi salah satu cara penghulu dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“pembahasan ini masih terkait dengan yg sebelumnya pada dasarnya untuk memberdayakan masyarakat yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ini ya dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan tersebut,nanti akan kita tentukan masyarakat yang bisa untuk kita berdayakan” (Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB,)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat ini penghulu Kampung Kemuning Muda mengusahakan beberapa masyarakat yang bisa dan mampu untuk ikut serta dalam pembangunan insfrastruktur di beberapa dusun di Kampung Kemuning Muda. Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021 , Mengatakan :

“masi sama halnya dengan yang sebelumnya bahwa masyarakat di nilai harus ikut serta dalam pembangunan ini namun dalam pelaksanaannya masyarakat setempat banyak yang tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan di kampung Kemuning muda ini, kami tidak mengetahui seperti apa penentuan masyarakat yang bisa mengikuti pembangunan ini.”(Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021 ,)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui terkait dengan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat ini, dinilai kurang karena belum ada komintmen dari Penghulu untuk mengikuti sertakan masyarakat setempat dalam Pembangunan insfrastruktur di Kampung Kemuning Muda.

4. Delegasi

Rusli Jacob (2006;23) mengatakan bahwa arti dari delegasi adalah suatu pemberian otoritas atau kekuasaan formal serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan tertentu pada pihak lain. Penyerahan otoritas oleh atasan ke bawahan ini sangat diperlukan agar fungsi perusahaan bisa berjalan dengan baik, karena tidak ada atasan yang mampu mengawasi setiap tugas-tugas organisasi secara efisien. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berhak : pada Huruf e berbunyi “memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa”.

Terkait dengan Permasalahan yang di angkat oleh peneliti terkait dengan gaya kepemimpinan Penghulu Kampung Kemuning Muda dalam hal penyelenggaraan pembangunan di Kampung Kemuning Muda ini,delegasi ini diartikan pemberian tanggung jawab dari Kepala penghulu kepada orang yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan fisik di kampung kemuning ini,hal ini agar program yang di jalankan dapat berjalan dengan lancar dengan tanggung jawab masing masing yang mendapatkan delaga dari Kepala Penghulu Kampung Kemuning, Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dalam indikator delegasi ini terdapat dua sub indikator terkait antara lain, memberikan sebagian wewenang kepada masyarakat, mempercayai kepada staff dalam menyelesaikan tugas . maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

- a. Memberikan sebageian wewenang kepada masyarakat

Memberikan sebagian wewenang kepada masyarakat ini diartikan sebagai

pendelegasian wewenang dari Penghulu kepada masyarakat terkait dengan pembangunan fisik di Kampung Kemuning Muda ini, Penghulu memberikan wewenang kepada masyarakat untuk memberikan masukan berupa ide, tenaga maupun evaluasi hasil pembangunan. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Kewenangan yang saya berikan kepada masyarakat setempat terkait dengan pembangunan infrastruktur di kampung Kemuning Muda ini, ya berupa kewenangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik berupa ide, tenaga dan evaluasi hasil pembangunan. (Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat kita ketahui terkait dengan indikator memberikan kewenangan berupa hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik berupa ide, tenaga dan evaluasi hasil pembangunan. Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021 , Mengatakan :

“terkait dengan pemberian kewenangan kepada kami selaku masyarakat dalam Pembangunan di kampung ini, bisa di katakan penghulu memberikan kewenangan terkait dengan masukan terhadap hasil pembangunan kalo untuk partisipasi masih di tentukan oleh Penghulu tersebut,dan saya katakan Penghulu kurang Demokratis dalam Pembangunan” (Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Pemberian wewenang kepada masyarakat bahwa Penghulu memberikan wewenang untuk masyarakat setempat untuk mengevaluasi Hasil Pembangunan untuk partisipasi atau ikut serta dalam pembangunan masih di tentukan oleh Bapak Penghulu Kampung Kemuning Muda .

b. Mempercayai Kepada Staf dalam menyelesaikan tugas

Pada indikator Mempercayai Kepada Staf dalam menyelesaikan tugas ini diartikan sebagai pendelegasian wewenang kepada staf untuk menyelesaikan tugas yang ada. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“pada dasarnya kita memang harus percaya terhadap staf kita sendiri terlebih dalam menjalankan sebuah kegiatan ketika kita tidak memberikan sebagian wewenang kita kepada staf kita maka kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik” (Bapak Mujiran, Penghulu Kampung Kemuning Muda hari Senin, 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan memberikan kepercayaan kepada staf dalam menyelesaikan tugas ini bahwa, penghulu kampung Kemuning Muda, mendelegasikan beberapa wewenang kepada staf untuk menjalankan sebaquah kegiatan atau tugas seperti dalam kegiatan Pembangunan, di berikan wewenangan untuk menjalankan kegaitan tersebut. Kemudian kita akan melihat hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021 , Mengatakan :

“ terkait dengan bapak penghulu memberikan kepercayaan kepada staf untuk menyelesaikan tugasnya, untuk secara jelas saya sendiri tidak mengetahui akan hal tersebut , saya hanya melihat dalam menjalankan sebuah program Kampung Kemuning muda penghulu turut mengikut serta kan Staf untuk menjalankan Kegiatan tersebut.” (Bapak Basuki selaku tokoh masyarakat Kampung Kemuning Muda, pada hari Senin , 22 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Penghulu memberikan kepercayaan kepada staf dalam menyelesaikan tugas ini bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan hal tersebut.

Kesimpulan dari keseluruhan Indikator yang ada dalam penelitian ini yaitu terkait dengan gaya kepemimpinan Penghulu Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dapat di katakan kurang maksimal di karenakan teradapat beberapa indikator dalam Permasalahan yang di angkat oleh peneliti ini seperti yang pertama pada indikator Intruksi diketahui bahwa penghulu memberikan arahan bahwa akan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan namun dalam kenyataannya tidak terlaksana, kedua pada indikator Partisipasi ini terkait dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan di Kampung Kemuning Muda dan yang terjadi di lapangan masyarakat setempat tidak di ikut sertakan .

C. Faktor- Faktor penghambat dalam penerapan Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak

1. Kurangnya pemberdayaan masyarakat oleh Penghulu Kampung Muda melalui mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur yang ada di beberapa dusun di Kampung Kemuning Muda
2. Penghulu Kurang Demokratis dalam pembangunan Kampung Kemuning Muda , ini di contohkan seperti masyarakat kurang di beri ruang untuk berpartisipasi baik berupa ide, dan evaluasi hasil pembangunan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab V hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan terkait dengan Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, bahwa dalam penelitian ini terdapat 4 indikator antara lain, Intruksi, Konsultasi, Partisipasi, Delegasi, dalam hal ini ada beberapa indikator yang tidak terlaksana seperti pada indikator intruksi bahwa Penghulu mengintruksi kan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak, dan selanjutnya pada indikator kedua pada indikator Partisipasi ini terkait dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan di Kampung Kemuning Muda dan yang terjadi di lapangan masyarakat setempat tidak di ikut sertakan. namun terkait dengan Gaya Kepemimpinan Penghulu Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, adapun hambatan tersebut antara lain :

1. Kurangnya pemberdayaan masyarakat oleh Penghulu Kampung Muda melalui mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur yang ada di beberapa dusun di Kampung Kemuning Muda

2. Penghulu Kurang Demokratis dalam pembangunan Kampung Kemuning Muda , ini di contohkan seperti masyarakat kurang di beri ruang untuk berpartisipasi baik berupa ide, dan evaluasi hasil pembangunan.

B. Saran

1. Disarankan Kepada Penghulu Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak untuk mengikut sertakan Masyarakat dalam pembangunan hal ini termasuk memberdayakan masyarakat yang dapat meningkatkan taraf Hidup masyarakat Kampung Kemuning Muda.
2. Disarankan Kepada Penghulu Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak untuk lebih demokratis dalam pembangunan Kampung Kemuning Muda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Atmosudirdjo. 2002. *Ilmu Sosial dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.W, Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan. 2002. *Manajemen Sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Perkasa.
- HR. Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: PT Rajawali.
- Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memhami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- L.W Rue dan G.R Terry. 2001. *Dasar- Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. 2004. *Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPFE*. Yogyakarta.
- Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR, Publishing Marpoyan Tujuh.
- Musaneff, 1997, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Gunung agung
- Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Jaya.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2002. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Jaya.
- Ndraha, 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Rineka Cipta.

- Nurcholis, Hanif. 2001. *Perumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid, M. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Yasif Wtampone.
- Robbin, S. P. 2012. *Perilaku Organisasi*, diTerjemahkan Oleh Handayana Puja Atmaka. Jakarta: PT. Pranhallindo.
- Sallam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Siagian, S.P. 2012. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei* (Editor). LP3ES. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. 2017. *Pengantar Manajemen Teori dan Kasus, Caps (Center For Academia Publishing Service)*. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sisitem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2015. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Depok: PT: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- Veitzhal, Rivai 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta : PT Rajawali.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Wirawan. 2013. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Prilaku organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

FEBRIAN, Ranggi Ade. Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *WEDANA : Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*,2015, 1.1 :41-49

KAWUNG,STASIA HELLN;POSUMAH,JOHNNY HANNY,RURU, JOORIE MARHAEN.pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. *JURNAL ADMINISTRASIPUBLIK*,2020,5.81

LAMANGIDA,Trisusanti;AKBAR,Muh Firyal; HASAN, HasnaGaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menyenggerakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Publik (Jurnal Ilmu Administasi)* 2017, 6.1:68-78

FATHONI,Mukhamad. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, 3.1: 139-146

APRILIANTI, Silvia. Gaya Kepemimpinan Lurah Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, 3.1 : 96-101

JACOBUS, Lucky; KAUNANG,Markus. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Eksekutif*, 2018,1.1

Yuslaini, Nina, and Septa Juliana. "Evaluasi program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 5.2 (2019): 7-15

Setiawan, Rizki. " Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ." *WEDANA: Jurnal Pemberdayaan masyarakat, Politik dan Birokrasi* 5.2 (2015): 72-78

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

PERDA Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kampung-adat.

Sumber Lainnya:

Eprints.mercubuana-yogya.ac.id